

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN  
KEARSIPAN TERHADAP KINERJA PENGELOLA KEARSIPAN  
(Studi Kasus pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya)**

**Teguh Purnama**

Mahasiswa Magister Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi  
YPPT Priatim Tasikmalaya

Email: [teguh.purnama32@gmail.com](mailto:teguh.purnama32@gmail.com)

**ABSTRACT**

This research is supported by the existence of indicators of the performance of the Archives Manager at the Tasikmalaya City Government's Regional Apparatus Work Unit (SKPD), which is thought to be low and not optimal. One of the causes of this phenomenon is the misunderstanding of what is meant by archives or archives which are assumed to be piles of paper - used papers that are piled up, dirty, dusty and useless and archiving activities are activities that provide benefits. This study uses a descriptive research approach with research variables consisting of independent variables, namely the implementation of policies with independent sub-variables, Manager with the dependent sub variable includes: individual work results, behavior and attitude. Samples were taken from the population with census techniques and data collection techniques were carried out through questionnaires, questionnaires, interviews and observations, which consisted of primary data and secondary data, which were then analyzed quantitatively. The results showed that: 1) there is a significant effect (significant) of the sub variable (dimension): communication, resources, disposition and bureaucratic structure on the performance of archival managers SKPD Tasikmalaya City Government either simultaneously or partially; 2) Sub variable communication is a dimension that has a dominant influence on the performance of archival managers at the SKPD of the City Government of Tasikmalaya.

**Keywords: Implementation, Archiving, Archives**

**ABSTRAK**

Penelitian ini fokus pada kinerja Pengelola Kearsipan pada Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Tasikmalaya, diduga masih rendah dan belum optimal. Salah satu penyebab fenomena ini adalah adanya pemahaman yang keliru tentang apa yang dimaksud dengan arsip atau kearsipan yang diasumsikan sebagai tumpukan kertas – kertas bekas yang tertumpuk, kotor berdebu dan tidak berguna lagi dan kegiatan kearsipan merupakan kegiatan yang memberikan manfaat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan variable bebas yaitu implementasi kebijakan sedangkan kinerja Pengelola Kearsipan dengan Sub Variable terikat antara lain : hasil pekerjaan individu, prilaku dan sikap. Sampel diambil dari populasi dengan tehnik sensus dan tehnik pengumpulan data dilakukan melalui tehnik angket, kuesioner, wawancara dan observasi, yang terdiri dari data primer dan data sekunder yang selanjutnya data tersebut di analisis secara kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) ada pengaruh yang nyata (signifikan) dari sub variable (dimensi) : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap kinerja pengelola kearsipan pada SKPD Pemerintah Kota Tasikmalaya baik secara simultan maupun secara parsial; 2) Sub Variable komunikasi adalah dimensi yang memberikan pengaruh dominan terhadap kinerja pengelola kearsipan pada SKPD Pemerintah Kota Tasikmalaya.

**Kata Kunci: Implepentasi, Kearsipan, Arsip**

## **PENDAHULUAN**

Penelitian ini berfokus kepada implementasi kebijakan pembinaan kearsipan pada pengelola kearsipan dengan lokus di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Tasikmalaya. Pemerintah Kota Tasikmalaya pada tahun 2020 memiliki 27 SKPD yang terdiri dari 4 Badan, 12 Dinas, 1 Rumah Sakit dan 10 Kecamatan. Setiap SKPD tersebut dalam rutinitasnya merupakan produsen atau penghasil arsip baik arsip dinamis atau ststis. Jika dilihat sepintas arsip bukan segala- galanya, tetapi arsip akan dirasakan penting dan menjadi prioritas utama apabila seseorang tersandung masalah hukum baik saat pemeriksaan atau penyidikan. Sehingga arsip harus dapat di hadirkan dan di buktikan sebadai dokumen yang menyangkut aturan kebijakan yang dapat di petanggung jawabkan maka kita akan dapat terhindar dari masalah hukum.

Kejadian tersebut dapat terjadi apabila kurangnya perhatian terhadap sarana penunjang kearsipan yang lebih memadai seperti tersedianya depot arsip, tersedianya sumber daya manusia kerasiapan, serta eksistensi lembaga kearsipan dalam memberikan pembinaan dan pengelolaan administrasi kearsipan dalam menunjang administrasi kearsipan pemerintah daerah. Fenomena umum tentang kearsipan yang sangat miris adalah pengetahuan tentang kearsipan. Pada saat melakukan wawancara pada studi pendahuluan masih banyak pegawai yang menyatakan bahwa arsip adalah kertas-kertas bekas yang disimpan, ditumpuk serta kurang mempunyai manfaat lagi. Selain cara penyimpanannya yang ditumpuk, kondisinya kotor berdebu, bahkan di simpan dalam karung. Selain itu filling cabinet yang seharusnya berisi arsip, tidak sedikit pada kontor, dinas difungsikan sebagai tempat menyimpan barang seperti buku, mukena, sajadah dan lain sebagainya.

Adapun indikator rendahnya kinerja pengelola kearsipan disebabkan oleh sistem dan mekanisme kerja yang kurang mendukung dan masih terdapat penyimpangan dan pengurusan arsip tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya. Dengan terbitnya Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2003, tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kota Tasikmalaya dan peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 7 A Tahun 2006 tentang Tata Naskah Pemerintah Kota Tasikmalaya yang memberikan arahan dalam mengadakan penataan surat menyurat melalui pemakaian kode klasifikasi, pengolahan dan penyimpanan arsip dari realisasi operasional pemerintahan serta pembuatan format surat, penetapan dan pembubuhan lambang di dalam surat pada pelaksanaan penataan dan pengolahan administrasi di SKPD seharusnya menjadi pedoman dan solusi dalam pengelolaan kearsipan SKPD. Oleh hal tersebut pembinaan kearsipan terhadap pengelola kearsipan pada setiap SKPD dilakukan secara berkala sebagai langkah awal untuk menggali permasalahan dan sebagai solusi dalam pengelolaan kearsipan.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisa data – data dan fakta-fakta dilapangan dengan menggunakan model implementasi pembinaan kearsipan melalui pengaruh dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi terhadap kinerja pengelola kearsipan di SKPD Kota Tasikmalaya, sehingga dapat menemukan konsep-konsep baru dalam implementasi pembinaan kearsipan pemerintahan Kota Tasikmalaya.

## **KAJIAN PUSTAKA PUSTAKA**

Kebijakan publik merupakan serangkain aktiuvitas yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat dan yang dituangkan dalam dama bentuk regulasi, sehingga menjadi acuan resmi

dalam melaksanakan kegiatan serta memuat hukuman bagi yang melanggarnya. Untuk melaksanakan keinginan masyarakat yang menitik beratkan kepada pemerintah, maka kebijakan yang telah mempunyai ketetapan perlu untuk di jalankan, seperti yang telah dikemukakan oleh (Wahab: 2008:17) Merumuskan secara terperinci pembuatan kebijaksanaan Negara sebagai:

*Semua proses untuk mengartikulasikan dan mendefinisikan masalah, merumuskan solusi yang memungkinkan ke dalam tuntutan politik, menyalurkan tuntutan tersebut ke dalam sistem politik, mencari sanksi atau legitimasi tindakan yang disukai, legitimasi dan implementasi pemantauan dan tinjauan (umpan balik).*

Pandangan tersebut menyatakan bahwa orang yang akan ikut berpartisipasi dan mempunyai peranan dalam proses mencapai tujuan, secara umum akan ditentukan oleh struktur politik dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah berdasarkan kepentingan umum yang akan di jalankannya. Sejalan dengan hal tersebut, menurut pandangan hogwood dan Gunn 1986, dalam (Rusli 2013:38) bahwa :

*In order for a policy to be called a public policy, then to a certain degree it must be created, thought about or at least processed through certain procedures and under the influence or control of the government.*

Berdasarkan pendapat tersebut di atas tentang implementasi kebijakan, yang penguraianya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu yang sangat penting dalam pelaksanaan administrasi yang juga merupakan keputusan sebagai kebijaksanaan dasar yang bernilai proses dalam melaksanakan pembinaan yang berstruktur pada pencapaian tujuan dengan menyediakan sarana yang berupa aturan-aturan untuk melaksanakan kebijakan public tersebut dan diberi hasil penerapannya, berkaitan dengan pembentukan kebijakan (policy) dengan konsekwensi-konsekwensi (concequences) tertentu yang dapat menimbulkan dampak sebagai akibat terhadap penerapan-penerapan yang dilakukan kepada masyarakat (public).

Peningkatan pembinaan merupakan suatu cara untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kebijakan yang diterapkan berdampak terhadap kinerja yang berkaitan dengan tuntutan perundang- undangan dan aturan kebijakan lain yang bersifat otonomi, atau untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana sikap serta prilaku dapat meningkatkan kinerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Mempelajari teori organisasi, berarti kita perlu mempelajari prilaku keorganisasian, (organization behavior) dan memahami prilaku manusia di dalam suatu organisasi yang sangat penting seperti prilaku produktivitas karyawan, kualitas kehidupan kerja, stress pada waktu bekerja dan kemajuan karir. Peningkatan suatu kinerja di dalam operasionalisasinya, memerlukan teknis manajeral, seperti yang dikemukakan Winardi (2014:15) bahwa manajemen strategic adalah :

*Suatu seni dan ilmu dari pembuatan (formulating, penerapan (implementing) dan evaluasi (evaluating), keputusan-keputusan strategis antar fungsi-fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan – tujuan masa yang akan datang.*

Adapun pelaksanaan dalam kontek perubahan sikap dan prilaku, Gibson et al yang dikutip oleh Winardi (2014:16), di dalam teori organisasi yang mengemukakan bahwa, “organisasi didirikan oleh prilaku mereka yang diarahkan kearah tujuan atau sasaran tertentu, dengan kata lain bahwa organisasi sangat mempengaruhi prilaku kita”. Berdasarkan pandangan tersebut, penulis berpendapat bahwa pembinaan kearsipan mempunyai keterkaitan dengan teori yang dikemukakan, karena kearsipan bertujuan untuk sejauhmana realitas kinerja para

pengelola kearsipan yang mempunyai relevansi untuk merubah sikap dan prilakunya untuk menjalankan tugas-tugasnya dalam organisasi.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif eksplanatif dengan menguraikan bagaimana pengumpulan data dilakukan, analisis apa yang digunakan dan bagaimana hasil analisis data itu diinterpretasikan.

Berdasarkan tingkat eksplanasinya, maka penelitian ini dapat dikelompokkan kedalam penelitian kuantitatif korelatif yaitu untuk menganalisis pengaruh antara variable bebas dan variable terikat. Dalam hal ini pengaruh antar variable bersifat kausal, bahwa variable bebas atau variable pengaruhnya adalah implementasi kebijakan pemerintah Kota Tasikmalaya yang merujuk pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards III oleh Widodo (2017:96) sebagai (X), yang meliputi empat dimensi yaitu,

1. Dimensi komunikasi (X1);
2. Dimensi sumber daya (X2);
3. Dimensi disposisi (X3);
4. Dimensi struktur organisasi (X4).

Sedangkan variable terikat atau terpengaruhnya adalah kinerja pengelola kearsipan di SKPD Kota Tasikmalaya, yang merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Robbins sebagai (Y), yang meliputi tiga dimensi yaitu:

1. Dimensi hasil pekerjaan individu;
2. Dimensi perilaku;
3. Dimensi sikap.

Teori pengukuran yang digunakan adalah metode Deskriptif Eksplanatif artinya penelitian dilakukan dengan mendeskripsikan data dari responden penelitian yang dikumpulkan melalui metode sampling di seluruh SKPD Kota Tasikmalaya, kemudian hasilnya di uji dengan hipotesis penelitian yang dirumuskan, sehingga akan dapat menjawab identifikasi masalah sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan. Keberadaan data yang diperoleh dapat digunakan sebagai besar ukuran dari besaran pengaruh disetiap sub variable penelitian dan dalam penelitian ini, pengujian kausalitas dari beberapa sub variable X terhadap Y, maka penganalisaan data yang akan digunakan adalah analisis *regresi linear multiple*, yang dilanjutkan dengan menggunakan analisis jalur (*Path Analysis*).

Sebelum dilakukan analisis tersebut, data yang dikumpulkan dari responden terlebih dahulu dilakukan uji validitas untuk menguji keakuratan instrument penelitian. Uji ini perlu dilakukan agar dapat diketahui bahwa instrument penelitian yang digunakan merupakan alat ukur yang baik dan selanjutnya dilakukan uji internal koinsistensi, dimana uji ini dilakukan untuk mengetahui konsistensi penilaian yang diberikan terhadap setiap item pertanyaan yang dibuat dan akhirnya data yang diperoleh dari responden merupakan data yang berkala ordinal yang harus dirubah menjadi interval dengan menggunakan *metode successive interval*.

Perubahan skala ini dimaksudkan agar supaya dapat dilakukan operasi matematis terhadap jawaban responden dan yang pada akhirnya setelah dilakukan beberapa analisis tersebut, akan diuraikan tentang bagaimana terjadinya pengaruh variable bebas terhadap variable terikat berdasarkan struktur yang dibuat, sehingga diperlukan komunikasi, sumber

daya, disposisi atau para pelaksana dan struktur birokrasi dari hasil perhitungannya dalam mengkaji dan melaksanakan realisasi dari kinerja yang dilakukan berdasarkan kebijakan yang diimplementasikan pada pencapaian tujuan.

Penelitian ini terdiri dari dua kelompok responden yaitu para pengelola kearsipan yang berada di SKPD Kota Tasikmalaya yang telah mendapatkan SK Walikota sebagai pengelola kearsipan sebanyak 50 orang tenaga pengelola kearsipan yang tersebar di beberapa SKPD Kota Tasikmalaya. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sensus, dimana menurut Sugiono (2007:96) teknik sensus adalah teknik sampling dimana semua populasi dijadikan sampel. Setelah dihitung dan di uji nilai signifikan koefisien korelasi, selanjutnya untuk mengetahui bagaimana dan berapa besar pengaruh variable implementasi kebijakan pembinaan terhadap pengelola arsip, dihitung dengan menggunakan analisis regresi linear multiple.

Untuk menguji apakah persamaan regresi tersebut bersifat signifikan, artinya apakah pelaksanaan kebijakan berpengaruh terhadap efektivitas organisasi, perlu dihitung jumlah kuadrat regresi. Untuk menguji keberartian model regresi tersebut digunakan statistic uji F. Jika hasil pengujian bersifat signifikan ( $F > F_{table}$ ), maka terdapat pengaruh yang signifikan dari variable implementasi kebijakan terhadap kinerja pengelola kearsipan. Jika hasil pengujian bersifat signifikan, selanjutnya dapat dihitung besarnya pengaruh variable bebas tersebut. Setelah dilakukan analisis dan pengujian terhadap model regresi linear multiple, selanjutnya dilakukan analisis jalur yang digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh dari setiap sub variable penelitian secara langsung maupun berdasarkan jalur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner penelitian, diperoleh distribusi presentase jawaban responden yang berstrata dengan rata – rata tanggapan untuk dimensi komunikasi pada implementasi kebijakan pembinaan kearsipan, berada pada urutan rengking yang dimulai dari nilai skala likert dengan skor 5,4,3,2 dan 1 yang berarti, bahwa pembinaan kearsipan melalui dimensi komunikasi masih beragam tanggapan dari keberhasilan, yang pada akhirnya masih perlu proses yang intensif, baik dalam kejelasan penyampaian kebijakan maupun konsistensi dalam pembinaan yang dilakukan oleh Bidang kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya untuk mendeskripsikan dan mempengaruhi pada peningkatan kinerja pengelola kearsipan dan arsiparis yang professional.

Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner penelitian, distribusi presentase jawaban responden yang berstrata dengan rata-rata tanggapan untuk dimensi Sumber Daya pada implementasi kebijakan pembinaan kearsipan, berada pada urutan rengking yang dimulai dari nilai skala likert dengan skor 4,3,2,5 dan 1 yang berarti, bahwa pembinaan kearsipan melalui dimensi Sumber Daya masih diperlukan peningkatan signifikan melalui Sumber Daya Manusia (SDM) yang bersifat teknis (skill) fungsional dan peningkatan anggaran untuk dapat merealisasikan sarana dan prasarana yang menunjang di seluruh SKPD Kota Tasikmalaya serta mewujudkan peningkatan kinerja pengelola kearsipan secara optimal dan professional.

Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner penelitian, diperoleh distribusi presentase jawaban responden yang tidak berstrata dengan rata – rata tanggapan untuk dimensi disposisi pada implementasi kebijakan pembinaan kearsipan, berada pada urutan rengking yang dimulai

dari nilai skala likert dengan skort 3,1,4,5 dan 2 yang berarti, bahwa pembinaan kearsipan melalui dimensi disposisi, diharapkan adanya kerja sama pimpinan dengan para pengelola kearsipan dan staf/pelaksana yang lenih intensif untuk menungkatkan kinerja pada penyampaian tujuan organisasi dan adanya peningkatan kesejahtraan dalampeningkatan kinerja yang diharapkan, sehingga lebih professional dan optimal dalam merealisasikan seluruh kegiatan administrasi kearsipan pemerintahan.

Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner penelitian, diperoleh distribusi presentase jawaban responden yang tidak berstrata dengan rata-rata tanggapan untuk dimensi struktur birokrasi pada implementasi kebijakan pembinaan kearsipan, berada pada urutan rengking yang dimulai dari nilai skala likjert dengan skort 5,4,3,2,1 dan 3 yang berarti, bahwa pembinaan kearsipan melalui dimensi struktur birokrasi dalam penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembagian tugas, diperlukan pemberian kewenangan yang berstruktur dan ketegasan melaksanakan kewajiban yang dibebankan pada setiap tugas dengan alur kordinasi yang ditempuh dalam mendeskripsikan peningkatan kinerja yang lebih professional dan optimal.

Selain dari mengumpulkan data dari para responden mengenai variable implementasi kebijakan pembinaan kearsipan, peneliti juga memberikan instrument penelitian untuk variable kinerja pengelola kearsipan. Adapun presentase jawaban responden terhadap masing-masing dimensi adalah sebagaimana terlihat pada table – table berikut ini:

Berdasrkan hasil pengolahan kuesioner penelitian, diperoleh distribusi presentase jawaban responden yang tdak berstrata dengan rata – rata tanggapan untuk dimensi hasil pekerjaan individu pada kinerka pengelola kearsipan, berada pada urutan rengking yang dimulai dari nilai skala likert 4,5,3,2 dan 1 yang berarti, bahwa kinerja pengelola kearsipan melalui dimensi hasil pekerjaan individu, dibutuhkan keyakinan para pengelola kearsipan dan staf/pelaksana dalam penyelesaian tugas / kegiatan untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan peruntukannya, sehingga dapat memberikan nilai efektif dan efisien pada hasil pekerjaan individu yang diharapkan.

Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner penelitian, diperoleh distribusi presentase jawaban responden yang tidak berstrata dengan rata – rata tanggapan untuk dimensi prilaku pada kinerja pengelola kearsipan, berada pada urutan rengking yang dimulai dari skala likert dengan skort 4,3,2,5 dan 1 yang berarti, bahwa melalui dimensi prilaku pada kinerja pengelola kearsipan, diperlukan dengan jelas tanggungjawab dan loyalitas yang tidak hanya cukup, tetapi didukung oleh kredibilitas yang sangat konsisten terhadap tugas yang berkaitan dengan prilaku, sehingga dapat meningkatkan kinerja yang lebih professional dan optimal.

Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner penelitian, diperoleh distribusi presentase jawaban responden yang berstrata dengan rata-rata tanggapan untuk dimensi sikap pada kinerja pengelola kearsipan, berada pada urutan rengking yang dimulai dari nilai skala likert dengan skort 5,4,3,2 dan 1 yang berarti, bahwa kinerja pengelola kearsipan melalui dimensi sikap dari hasil kerja dapat memberikan masukan yang sangat bersifat kekeluargaa, adanya pemahaman antara pimpinan dengan pengelola kearsipan staf/pelaksana terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan dan dapat memberikan manfaat bagi organisasi dalam mendeskripsikan dan meningkatkan kinerja yang lebih profesional dan optimal.

### **Analisis Pengujian Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan pada variable penelitian implementasi kebijakan pembinaan kearsipan terhadap kinerja pengelola kearsipan di SKPD Kota Tasikmalaya, yang hasilnya didapatkan dari jawaban Responden pada kuesioner penelitian dan diolah sesuai dengan alternative pilihan dari nilai skala likert dengan penentuan skort selanjutnya diketahui terdapat korelasi antara ke empat sub Variable implementasi kebijakan yang terdiri dari dimensi komunikasi, dimensi sumber daya, dimensi disposisi dan dimensi struktur organisasi. Diantara keseluruhan Dimensi tersebut diadakan pengukuran, sehingga didapatkan pengaruh secara signifikan antara implementasi kebijakan pembinaan kearsipan terhadap kinerja pengelola kearsipan di SKPD Kota Tasikmalaya, seperti bentuk gambar struktur jalur dibawah ini:

Untuk menjawab hipotesis penelitian berdasarkan struktur jalur yang digunakan dapat diuraikan sebagai berikut:

Hubungan atau korelasi antar sub variable implementasi kebijakan pembinaan kearsipan yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap kinerja arsiparis di SKPD Kota Tasikmalaya yang terdiri dari hasil pekerjaan individu, prilaku dan sikap yang analisis korelasinya dilakukan dengan hipotesis statistik.

- Koefisien korelasi antar sub variabel komunikasi dengan sub variabel sumber daya adalah sebesar 0,462 dan dengan value sebesar 0.001 ( $< 0,05$ ). Hal ini menandakan bahwa sub variabel komunikasi mempunyai hubungan yang berarti dengan sub variabel sumber daya. Artinya bahwa komunikasi tempat pengelola kearsipan melaksanakan tugas berkorelasi dengan sumber daya dan mempengaruhi kinerjanya.
- Koefisien korelasi antar subvariabel komunikasi dengan subvariabel disposisi adalah sebesar 0,281 dan dengan p value sebesar 0,048 ( $< 0,05$ ). Hal ini menandakan bahwa sub variabel komunikasi mempunyai hubungan yang berarti dengan sub variabel sumber daya. Artinya bahwa komunikasi tempat arsiparis melaksanakan tugas berkorelasi dengan sumber daya dan mempengaruhi kinerjanya.
- Koefisien korelasi antar sub variabel komunikasi dengan subvariabel struktur birokrasi adalah sebesar 0,453 dan dengan p value sebesar 0.001 ( $< 0,05$ ). Hal ini menandakan bahwa sub variabel komunikasi mempunyai hubungan yang berarti dengan sub variabel sumber daya. Artinya bahwa komunikasi tempat Pengelola kearsipan melaksanakan tugas berkorelasi dengan sumber daya dan mempengaruhi kinerjanya.
- Koefisien korelasi antar sub variabel komunikasi dengan sub variabel kinerja pengelola kearsipan adalah sebesar 0,704 dan dengan p value sebesar 0.000 ( $< 0,05$ ). Hal ini menandakan bahwa sub variabel komunikasi mempunyai hubungan yang berarti dengan sub variabel sumber daya. Artinya bahwa komunikasi tempat pengelola kearsipan melaksanakan tugas berkorelasi dengan sumber daya dan mempengaruhi kinerjanya.
- Koefisien korelasi antar sub variabel sumber daya dengan sub variabel disposisi adalah sebesar 0,329 dan dengan p value sebesar 0.020 ( $< 0,05$ ). Hal ini menandakan bahwa sub variabel komunikasi mempunyai hubungan yang berarti dengan sub variabel sumber daya. Artinya bahwa komunikasi tempat arsiparis melaksanakan tugas berkorelasi dengan sumber daya dan mempengaruhi kinerjanya.
- Koefisien korelasi antar sub variabel sumber daya dengan sub variabel struktur birokrasi adalah sebesar 0,311 dan dengan p value sebesar 0.028 ( $< 0,05$ ). Hal ini menandakan bahwa

sub variabel komunikasi mempunyai hubungan yang berarti dengan sub variabel sumber daya. Artinya bahwa komunikasi tempat pengelola kearsipan melaksanakan tugas berkorelasi dengan sumber daya dan mempengaruhi kinerjanya.

- Koefisien korelasi antar sub variabel sumber daya dengan sub variabel kinerja arsiparis adalah sebesar 0,618 dan dengan p value sebesar 0.000 ( $< 0,05$ ). Hal ini menandakan bahwa sub variabel komunikasi mempunyai hubungan yang berarti dengan subvariabel sumber daya. Artinya bahwa komunikasi tempat pengelola kearsipan melaksanakan tugas berkorelasi dengan sumber daya dan mempengaruhi kinerjanya.
- Koefisien korelasi antar sub variabel disposisi dengan sub variabel struktur birokrasi adalah sebesar 0,290 dan dengan p value sebesar 0.041 ( $< 0,05$ ). Hal ini menandakan bahwa sub variabel komunikasi mempunyai hubungan yang berarti dengan subvariabel sumber daya. Artinya bahwa komunikasi tempat arsiparis melaksanakan tugas berkorelasi dengan sumber daya dan mempengaruhi kinerjanya.
- Koefisien korelasi antar sub variabel disposisi dengan sub variabel kinerja arsiparis adalah sebesar 0,530 dan dengan p value sebesar 0.000 ( $< 0,05$ ). Hal ini menandakan bahwa sub variabel komunikasi mempunyai hubungan yang berarti dengan sub variabel sumber daya. Artinya bahwa komunikasi tempat pengelola kearsipan melaksanakan tugas berkorelasi dengan sumber daya dan mempengaruhi kinerjanya.
- Koefisien korelasi antar sub variabel struktur birokrasi dengan sub variabel kinerja pengelola kearsipan adalah sebesar 0,585 dan dengan p value sebesar 0.000 ( $< 0,05$ ). Hal ini menandakan bahwa subvariabel komunikasi mempunyai hubungan yang berarti dengan sub variabel sumber daya. Artinya bahwa komunikasi tempat arsiparis melaksanakan tugas berkorelasi dengan sumber daya dan mempengaruhi kinerjanya.

### **Analisis Pengaruh Implementasi Kebijakan Pembinaan Kearsipan terhadap Kinerja Pengelola Kearsipan di SKPD Tasikmalaya.**

Untuk mengetahui pengaruh variable implementasi kebijakan pembinaan kearsipan terhadap kinerja Pengelola Kearsipan di SKPD Kota Tasikmalaya, dilakukan analisis regresi linear multiple dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

Dari output SPSS di atas tersebut terlihat bahwa nilai signifikansi F bernilai lebih kecil dari 0,05, yaitu  $a = < 0,00001$ , artinya kinerja Pengelola Kearsipan sangat dipengaruhi oleh implementasi kebijakan pembinaan kearsipan yang terdiri dari dimensi-dimensi atau subvariabel Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dari implementasi kebijakan itu sendiri dan dari hasil tersebut diatas, dapat dinyatakan bahwa  $H_0 : P_{yX_{1234}} = 0$  ditolak dan  $H_0 : P_{yX_{1234}} \neq 0$  diterima, artinya menerima hipotesis konseptual yang berbunyi :

“Besarnya Pengaruh Implementasi Kebijakan Pembinaan Kearsipan terhadap Kinerja Pengelola Kearsipan di SKPD Tasikmalaya“, ditentukan oleh dimensi-dimensi Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dan demikian pula sebaliknya, bahwa “ Semakin Kecil Pengaruh Implementasi Kebijakan Pembinaan, Maka Kinerja Pengelola Kearsipan Semakin Rendah”.

Hasil Perhitungan memberikan informasi bahwa nilai koefisien determinasi yaitu sebesar 0,727 atau 72,7%. Artinya 72,7% pada variasi kinerja Pengelola Kearsipan yaitu komunikasi ( $X_1$ ), sumber daya ( $X_2$ ), disposisi ( $X_3$ ) dan struktur birokrasi ( $X_4$ ). Hal ini

menunjukkan bahwa pilar-pilar atau dimensi-dimensi yang dikemukakan oleh Edward III memberikan penjelasan, bahwa sebuah implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh keempat dimensi tersebut diatas (Komunikasi sebagai  $X_1$ , Sumber Daya sebagai  $X_2$ , Disposisi sebagai  $X_3$  dan Struktur Birokrasi sebagai  $X_4$ ) yang dapat diterapkan pada Implementasi Kebijakan Pembinaan Kearsipan terhadap Kinerja Pengelola Kearsipan di SKPD Tasikmalaya.

Adapaun akibat lain diterimanya hipotesis penelitian yaitu memberikan informasi bahwa variable implementasi kebijakan dengan empat dimensi yang dikemukakan oleh Edward III, memiliki validitas yang baik, sebab keempat dimensi tersebut teruji oleh data hasil survey yang menunjukkan tidak ada satupun jalur yang dihilangkan dari model, sedangkan untuk melihat berapa besarnya dari masing-masing faktor yang akan berpengaruh terhadap kinerja Pengelola Kearsipan, dapat dilakukan analisis pengujian hipotesis. Untuk menguji semua rumusan hipotesis tersebut dapat dilakukan dengan analisis regresi (output spss diatas) dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 14 tersebut diatas dapat terlihat, bahwa sub variable komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pengelola kearsipan, karena nilai signifikasinya adalah  $> 0,05$  yaitu masing-masing sebesar 0,000; 0,004; 0,004; 0,008

### **Nilai Statistic Uji t**

Bila di dasarkan pada model persamaan baku tersebut, dapat disajikan ke dalam bentuk struktur jalur dari gambar di atas yang terlihat dan dapat memberikan penjelasan, bahwa semua nilai koefisien jalur untuk masing-masing dimensi memiliki hasil pengujian yang signifikan, karena nilai staitistik uji t lebih besar dari 1,96 ( $\alpha = 5\%$ ), sehingga dapat disimpulkan, bahwa dimensi komunikasi ( $X_1$ ), sumber daya ( $X_2$ ), disposisi ( $X_3$ ) dan struktur birokrasi ( $X_4$ ) secara langsung masing-masing berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Pengelola Kearsipan.

Struktur jalur tersebut dapat diuraikan bahwa implementasi kebijakan pembinaan kearsipan yang terdiri dari dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi berpengaruh sangat signifikan.

### **Analisis Pengaruh Dimensi Komunikasi terhadap Kinerja Pengelola Kearsipan di SKPD Tasikmalaya.**

Setelah dilakukan perhitungan koefisien korelasi dan analisis regresi yang berdasarkan struktur jalur, diperoleh masing-masing nilai hasil perhitungan yang dapat diartikan

Besaran pengaruh subvariabel komunikasi terhadap kinerja Pengelola Kearsipan yaitu sebesar 27.61% atau dapat menerima hipotesis konseptual dari Besarnya Pengaruh Implementasi Kebijakan Pembinaan Kearsipan terhadap Kinerja Pengelola Kearsipan di SKPD Tasikmalaya, yang ditentukan oleh dimensi komunikasi. Secara signifikan dimensi komunikasi mempengaruhi kinerja Pengelola Kearsipan secara keseluruhan maupun kebijakan pemimpin yang memberikan pengaruh terhadap Pengelola Kearsipan dalam melaksanakan kerjanya. Hal ini mengandung arti, bahwa semakin baiknya komunikasi di dalam lembaga/organisasi, maka akan semakin baik kebijakan pembinaan kearsipan yang dilakukan.

Setelah dilakukan perhitungan koefisiensi korelasi dan analisis regresi berdasarkan struktur jalur, diperoleh masing-masing nilai hasil perhitungan yang dapat diartikan dengan cara sebagai berikut:

Pengaruh Dimensi Sumber Daya ( $x_2$ ) terhadap kinerja pengelolaan kearsipan adalah:

- Secara langsung :  $(0,2753) \times (0,2753) \times 100\% = 7,58\%$   
 Melalui Dimensi Komunikasi :  $(0,2753) \times (0,462) \times (0,3924) \times 100\% = 4,99\%$   
 Melalui Dimensi Disposisi :  $(0,275) \times (0,329) \times (0,2574) \times 100\% = 2,33\%$   
 Melalui Dimensi Struktur Birokrasi :  $(0,2753) \times (0,311) \times (0,2470) \times 100\% = 2,12\%$

Sehingga pengaruh Dimensi interpretasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung adalah  $= 7.58+4.99+2.33+2.12\%=17.01\%$ .

Besaran pengaruh subvariabel sumber daya terhadap kinerja Pengelola Kearsipan yaitu sebesar 17.01%. atau dapat menerima hipotesis konseptual dari Besarnya Pengaruh Implementasi Kebijakan Pembinaan Kearsipan terhadap Kinerja Pengelola Kearsipan di SKPD Tasikmalaya, ditentukan oleh dimensi sumber daya. Hal ini mengandung arti bahwa pemahaman sumber daya terhadap sebuah implementasi kebijakan sangat penting, sebab akan berpengaruh terhadap kinerja Pengelola Kearsipan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Kesalahan menginterpretasikan sebuah kebijakan akan berakibat kurang baik bahkan berakibat buruk terhadap hasil kerja, sehingga hasil kerja jauh dari apa yang diharapkan. Dengan melihat besaran hasil perhitungan pengaruh dimensi sumber daya terhadap kinerja Pengelola Kearsipan maka dapat dikatakan dimensi sumber daya mempengaruhi kinerja Pengelola Kearsipan secara signifikan.

Pengaruh Dimensi Disposisi ( $X_3$ ) terhadap kinerja Pengelola Kearsipan adalah:

- Secara langsung :  $(0,2574) \times (0,2574) \times 100\% = 6.63\%$   
 Melalui Dimensi Komunikasi :  $(0,2574) \times (0,281) \times (0,3924) \times 100\% = 2.84\%$   
 Melalui Dimensi Sumber Daya :  $(0,2574) \times (0,329) \times (0,2753) \times 100\% = 2.33\%$   
 Melalui Dimensi Struktur Birokrasi :  $(0,2574) \times (0,290) \times (0,2470) \times 100\% = 1.85\%$

Sehingga total pengaruh Dimensi Aplikasi terhadap kinerja Pengelola Kearsipan baik secara langsung maupun secara tidak langsung adalah  $= 6.63\%+2.84\%+2.33\%+1.85\%=13.64\%$ .

Besaran pengaruh sub variabel disposisi terhadap kinerja Pengelola Kearsipan yaitu sebesar 13.64%. atau dapat menerima hipotesis konseptual dari Besarnya Pengaruh Implementasi Kebijakan Pembinaan Kearsipan terhadap Kinerja Pengelola Kearsipan di SKPD Tasikmalaya ditentukan oleh dimensi disposisi. Kenyataan ini mengandung arti bahwa dimensi disposisi, mengandung arti bahwa dimensi disposisi atau dari implementasi dari kebijakan itu sendiri mempengaruhi kinerja Pengelola Kearsipan secara signifikan. Penerapan sebuah implementasi sangat mempengaruhi kinerja para pegawai dalam hal ini Pengelola Kearsipan karena penerapan yang tidak memberikan hasil (output) yang diharapkan. Dengan melihat besaran angka hasil penelitian berarti dimensi disposisi dari implementasi kebijakan pembinaan kearsipan sangat berpengaruh terhadap kinerja Pengelola Kearsipan akan sesuai dengan yang diharapkan.

Pengaruh implementasi kebijakan pembinaan kearsipan melalui dimensi disposisi ini memiliki angka persentase yang signifikan namun disposisi atau penerapan implementasi ini akan lebih berdayaguna dan berhasil guna apabila dukungan saran dan prasarana kearsipan yang dibutuhkan mencukupi. Pada kenyataan dilapangan pemenuhan sarana dan prasarana

kearsipan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah masih belum sesuai dengan kebutuhan. Hal ini karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk pemenuhan kebutuhan tersebut.

Pengaruh Dimensi Struktur Birokrasi (X4) terhadap kinerja Pengelola Kearsipan adalah:

Secara langsung	: $(0.2470) \times (0.2470) \times 100\% = 6.10\%$
Melalui Dimensi Komunikasi	: $(0.2470) \times (0.453) \times (0.3924) \times 100\% = 4.39\%$
Melalui Dimensi Sumber Daya	: $(0.2470) \times (0.311) \times (0.2753) \times 100\% = 2.12\%$
Melalui Dimensi Disposisi	: $(0.2470) \times (0.290) \times (0.2574) \times 100\% = 1.85\%$

Sehingga total pengaruh Dimensi Aplikasi terhadap kinerja Pengelola kearsipan baik secara langsung maupun secara tidak langsung adalah  $= 6.10\% + 4.39\% + 2.12\% + 1.85\% = 14.46\%$ .

Besaran pengaruh sub variabel struktur birokrasi terhadap kinerja Pengelola Kearsipan yaitu sebesar 14.46%. atau dapat menerima hipotesis konseptual dari Besarnya Pengaruh Implementasi Kebijakan Pembinaan Kearsipan terhadap Kinerja Pengelola Kearsipan di SKPD Tasikmalaya ditentukan oleh dimensi struktur birokrasi. Kenyataan ini mengandung arti bahwa dimensi struktur birokrasi. Kenyataan ini mengandung arti bahwa dimensi struktur birokrasi atau dari implementasi dari kebijakan itu sendiri mempengaruhi kinerja Pengelola Kearsipan secara signifikan. Penerapan sebuah implementasi sangat mempengaruhi kinerja para pegawai dalam hal ini Pengelola Kearsipan karena penerapan yang tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi berarti implementasi tidak memberikan hasil (output) yang diharapkan. Dengan melihat besaran angka hasil penelitian berarti dimensi struktur birokrasi dari implementasi kebijakan pembinaan itu dilaksanakan secara benar maka kinerja Pengelola Kearsipan akan sesuai dengan yang diharapkan.

Pengaruh implementasi kebijakan pembinaan kearsipan melalui dimensi struktur birokrasi atau penerapan implementasi ini akan lebih berdaya guna dan berhasil guna apabila dukungan sarana dan prasarana kearsipan yang dibutuhkan mencukupi. Pada kenyataan di lapangan pemenuhan sarana dan prasarana kearsipan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah masih belum sesuai dengan kebutuhan. Hal ini karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk pemenuhan kebutuhan tersebut.

Berdasarkan hasil perhitungan, maka total pengaruh dari dimensi komunikasi, dimensi sumber daya, dimensi disposisi dan dimensi struktur birokrasi adalah:

$27.61\% + 17.01 + 13.64\% + 14.46\% = 72.73\%$ , nilai ini sama dengan nilai  $R^2$  yaitu 72.79%, sedangkan pengaruh faktor lain yang tidak diteliti adalah  $100\% - 72.73\% = 27.27\%$ . hal ini memberikan informasi bahwa nilai variable  $\epsilon$  yaitu 27.27%. Kenyataan ini mengandung arti bahwa pola variasi kinerja Pengelola Kearsipan di SKPD Tasikmalaya dipengaruhi oleh seperangkat variable lain diluar variable implementasi kebijakan pembinaan kearsipan sebesar 27.27%. Kinerja Pengelola Kearsipan di SKPD Tasikmalaya selain dipengaruhi oleh keempat faktor yang telah didefinisikan, juga dipengaruhi oleh faktor lain yakni sumber daya keuangan, sarana dan prasarana juga kebijakan pimpinan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengelola Kearsipan.

Menurut Steers yang dikutip Jamin (1984:8) bahwa sumber daya keuangan merupakan salah satu aspek dari karakteristik organisasi dan organisasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja. Dukungan sumber daya keuangan sangat mempengaruhi

terhadap ketersediaan sarana dan prasarana yang secara tidak langsung mempengaruhi terhadap kinerja. Pimpinanpun mempengaruhi kinerja karena tanpa itu semua kinerja Pengelola Kearsipan tidak dapat berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Namun demikian besaran persentase faktor-faktor diluar keempat dimensi penentu ( $X_1, X_2, X_3, X_4$ ) lebih kecil dibandingkan dengan total pengaruh keempat dimensi tersebut.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dan didapatkan, bahwa implementasi kebijakan pembinaan kearsipan terhadap kinerja pengelola kearsipan di SKPD Kota Tasikmalaya, sangat dipengaruhi oleh dimensi-dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam implementasian kebijakan yang signifikan dan bersifat menyeluruh antara lain:

1. Komunikasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja pengelola kearsipan di SKPD Kota Tasikmalaya, artinya bahwa komunikasi merupakan suatu alat untuk mewujudkan dalam penyampaian kebijakan, kejelasan petunjuk dari penerapan aturan, intensitas, akurasi dan konsistensi terhadap tugas yang diemban, yang akan berpengaruh terhadap kinerja pengelola kearsipan dalam rangka pembinaan kearsipan di SKPD Kota Tasikmalaya.
2. Sumber daya mempunyai pengaruh terhadap kinerja pengelola kearsipan di SKPD Kota Tasikmalaya, artinya bahwa sumber daya dapat menggerakkan seluruh komponen di dalam organisasi dengan besaran dukungan dana dari pemerintah dan jelasnya kewenangan yang akan berpengaruh terhadap kinerja pengelola kearsipan dalam rangka pembinaan kearsipan di SKPD Kota Tasikmalaya.
3. Disposisi mempunyai pengaruh terhadap kinerja pengelola kearsipan di SKPD Kota Tasikmalaya, artinya bahwa organisasi merupakan salah satu alat organisasi yang terdiri dari pemimpin dan struktur hilarki kebawahnya sampai staf pelaksana yang dapat menggerakkan, meningkatkan kinerja dan mewujudkan tujuan organisasi, yang didukung oleh peningkatan kesejahteraan dan akan berpengaruh terhadap kinerja pengelola kearsipan dalam rangka pembinaan kearsipan di SKPD Tasikmalaya.
4. Struktur Birokrasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja pengelola kearsipan di SKPD Kota Tasikmalaya, artinya bahwa struktur birokrasi memberikan pemisahan dan pembagian tugas kewenangan yang berstruktur dalam kelembagaan /organisasi yang didasari oleh penerapan standar organisasi dan prosedur dengan alur kordinasi yang akan berpengaruh terhadap kinerja pengelola arsip dalam rangka pembinaan kearsipan di SKPD Kota Tasikmalaya.

### **Saran**

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat memberikan gambaran dalam pengembangan konten analisa berpikir dan mempunyai makna yang sangat luas. Untuk pengembangan dan mewujudkan wawasan pola pikir yang berbentuk saran dari hasil perumusan penelitin yang telah dilakukan dalam kebijakann pembinaan kearsipan terhadap kinerja pengelola kearsipan di SKPD KotaTasikmalaya.

Peningkatan kinerja pengelola kearsipan di SKPD Kota Tasikmalaya , diperlukan kebijakan eksekutif dan legislatif untuk membuat peraturan dan keputusan daerah yang bersifat otonom dalam penciptaan jabatan pengelola kearsipan yang menata dan menata administrasi kearsipan pemerintah di setiap SKPD Kota Tasikmalaya, sehingga terwujudnya administrasi kearsipan pemerintahan yang dapat menciptakan kearsipan yang komunikatif berdasarakan keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 26 Tahun 2003, tentang tata kearsipan Pemerintah KotaTasikmalaya dan peraturan Walikota Nomor 7A Tahun 2006, tentang Tata

Naskah Pemerintahan Kota Tasikmalaya, peningkatan sumber daya kearsipan yang meningkatkan kinerja kearsipan baik dari sumber daya keuangan maupun sumber daya dari sarana dan prasarana kearsipan, disposisi atau para pelaksana yang sangat memahami efektifitas maupun efisiensi administrasi kearsipan pemerintahan yang signifikan dan struktur birokrasi yang memberikan dampak legilitas dan kewenangan pengelola kearsipan dalam menjalankan tugas-tugas kearsipannya pada pencapaian setiap tujuan dari setiap SKPD Kota Tasikmalaya.

Dalam rangka menunjang terciptanya pembinaan kearsipan terhadap kinerja pengelola kearsipan, diperlukan adanya kegiatan apresiasi kearsipan dengan mengundang para pakar kearsipan yang akan memberikan pemahaman dan kejelasan akan pentingnya arsip terhadap penentu kebijakan baik itu eksekutif, legislaif dan para birokrat.

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Tasikmalaya yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya sebagai lembaga teknis dalam menangani administrasi kearsipan pemerintahan untuk tetap eksis memberikan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis atau pendidikan, pelatihan dan peningkatan sumber daya lain berupa penunjang perencanaan strategi kearsipan, pembinaan dalam penataan dan pengolahan kearsipan keseluruhan Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berada di SKPD Tasikmalaya.

Sesuai dengan tujuan pemnelitian ini yaitu menganalisis data dan fakta dengan menggunakan model implementasi kebijakan melalui pengaruh komunikasi, sumber daya, disposis dan struktur birokrasi terhadap kinerja Pengelola Kearsipan, maka diharapkan dapat dirancang konsep-konsep baru oleh para pembuat kebijakan pembinaan kearsipan dalam meningkatkan kinerja Pengelola Kearsipan di SKPD Kota Tasikmalaya yang dapat diimplementasikan dimasing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Faktor lain yang dapat meningkatkan kinerja Pengelola Kearsipan di SKPD Tasikmalaya yaitu faktor hasil pekerjaan individu, prilaku dan sikap dalam prestasi kerja yang telah terbukti dalam penelitian berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja Pengelola Kearsipan serta staf/pelaksana sebagai tenaga pengelola kearsipan di SKPD Tasikmalaya.

Implementasi kebijakan pembinaan perlu didukung oleh organisasi dan peran pemimpinnya agar dapat menumbuhkan kesadaran bagi Pengelola Kearsipan dalam menginterpretasikan tugas pokok dan fungsinya. Arsip (archieive) sebagai sumber ingatan dan sumber informasi mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam suatu kelembagaan negara, dapat menciptakan dan meningkatkan stabilitas regional maupun nasional, juga merupakan strategi dalam pembangunan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal, 2004, *Kebijakan Publik Jakarta*: Yayasan Pabcur Sawah
- Albrow, Martin, 1989, *Birokrasi Terjemahan M Rusli Karim & Totok Daryanto*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Jogja.
- Amsyah, Zulkifli, 2001, *Manajemen Kearsipan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Azwar Syaefudin, 1997, *Reliabilitas dan Validitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bugin, Burhan, 2005, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Prenada Media. A.1986
- Brech, 1991, *Manajemen Perkantoran Modern*, Edisi ketujuh, Jakarta: PT Pusaka Binaman Pressindo.
- Davis, Keith dan John W. Newstrom, 1996, *Perilaku Dalam Organisasi*, Jilid 1 Edisi ketujuh (Penerjemah Agus Dharma) Jakarta : Erlangga.
- Dharma, Surya, 2005, *Manajemen Kinerja, Falsafah Teori dan Penerapannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Dunn, William N, 1981, *Public Policy Analysis: An Introduction*, New Jersey: Enggwood Cliffs.
- Geoffrey Mills, Oliver Standingford Robert C Appleby, *Manajemen Perkantoran Modern*, Edisi ketujuh, Jakarta: Binarupa Aksara, cetakan pertama
- Gibson, James L. John M. Ivancevich dan James h. Donnelly. 1996, *Organisasi, Jilid 1 Edisi Kedelapan (penerjemah Nunuk Adriani)* Jakarta: Binarupa Aksara.
- Islamy, Irfan, 1997, *Prinsip-prinsip Perrumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Binarupa Aksara.
- Jones, Charles O, 1984, *An Intrudiction to the study of Public Policy*, Third
- Robbins. Stephen.P, 1994, *Teori Organisasi Struktur, Desain dan Aplikasi*, Alih Bahasa Jusuf Udaya, Lic, Ec, Edisi 3, Jakarta : Arcan.
- Siagian, Sondang P, 1997, *Organisasi, Kepimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Steers, Richard M, 1985, *Efektifitas organisasi*, Jakarta: PT Erlangga.
- Thoha, Miftah, 2007, *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Thompson, Jhon. L, 1999, *A syrayegic Prespective of Enterpreneurship*, Huddersfield: MBC Univercity Press.
- Wahab, Solihin Abdul, 2008, *ANALISIS KEBIJAKSANAAN dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara (Edisi Kedua)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra, 1994, *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*, Jakarta: Intermedia.
- Wibowo, 2007, *Manajemen Kinerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Winardi, 1997, *Manajemen Strategik*, Bandung.
- Hadi, Didik Singgih, 2005, *Pengelola Kearsipan Butuh Pendidikan Berkelanjutan*, Majalah Gema Kearsipan, Nomor 21 Bandung: Basipda Prov Jabar.
- Santofo, Amir, 1989, *Analisis Kebijakan Publik: Masalah dan Pendekatan*. Journal Ilmu Politik, Nomor 4, 1989, Jakarta: AIPI - Gramedia
- Lasmanawati, Dewi, 2005, *Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Satu Pintu Diklat Aparatur terhadap Efektivitas Organisasi (Suatu Kasus tentang efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan latihan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat) Bandung: Pascasarjana Universitas Padjadjaran.*
- Ma'mun, Syaefudin, 2005, *Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Jalan Terhadap Efektivitas Pemeliharaan Jalan di Provinsi Jawa Barat*, Bandung: Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Undang-undang No. 7 Tahun 1971 tentang *Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan*.
- Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 2000 tentang *Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom*.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 09/Kep/M.PAN/2002 Tentang *Jabatan Fungsional Pengelola Kearsipan dan Angka Kreditnya*.
- Keputusan Kepala ANRI No.6 Tahun 2002 tentang *Kewenangan Penyelenggaraan Kearsipan*.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.6 Tahun 2002 tentang *Perubahan Perda Nomor 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat*.
- Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 26 Tahun 2003 tentang *Tata Kearsipan Pemerintah Kota Tasikmalaya*.
- Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 7 A Tahun 2006 tentang *Tata Naskah Pemerintah Kota Tasikmalaya*
- Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2004 tentang *Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Tasikmalaya*
- Rencana *Strategis Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Tasikmalaya, Tahun 2008 - 2012*